

Dinamika Sosial dan Identitas Transnasional Masyarakat Adat di Kawasan Perbatasan Papua–Papua Nugini

Melyana Ratana Pugu

Universitas Cenderawasih, Indonesia

Email: puguratana@yahoo.com

ABSTRACT

The Papua–Papua New Guinea border region represents a complex social space where indigenous communities maintain kinship, cultural, and economic ties that transcend modern state boundaries. This study aims to analyze the social dynamics of indigenous communities and how these dynamics shape and sustain transnational identities in the border area. The research employs a qualitative-descriptive approach using secondary data collected through a systematic literature review of scholarly journals, academic books, and relevant official documents. Data analysis is conducted using thematic analysis combined with content analysis to identify key patterns in social dynamics and identity construction. The findings reveal that transnational identity is continuously reproduced through everyday social practices such as cross-border family visits, traditional trade, and shared cultural rituals. Cross-border kinship networks remain the primary foundation of social organization. However, tensions persist between state policies, which emphasize administrative control and security, and local practices that are flexible and rooted in customary systems. The study concludes that border governance should adopt a more inclusive approach by recognizing indigenous communities as key actors rather than passive subjects. Integrating indigenous perspectives into formal governance structures is essential to achieving sustainable, adaptive, and context-sensitive border management.

Keywords: Social dynamics; Transnational identity; Indigenous peoples; Borders; Border governance.

ABSTRAK

Kawasan perbatasan Papua–Papua Nugini merupakan ruang sosial yang kompleks, di mana masyarakat adat mempertahankan hubungan kekerabatan, budaya, dan ekonomi yang melampaui batas negara modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika sosial masyarakat adat serta bagaimana dinamika tersebut membentuk dan mempertahankan identitas transnasional di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dan analisis konten untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam dinamika sosial dan konstruksi identitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas transnasional masyarakat adat terbentuk melalui praktik sosial sehari-hari seperti kunjungan keluarga, perdagangan tradisional, dan ritual adat lintas batas. Selain itu, jaringan kekerabatan lintas negara tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, terdapat ketegangan antara kebijakan negara yang bersifat administratif dengan praktik lokal yang lebih fleksibel dan berbasis adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola perbatasan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat adat sebagai aktor utama. Dengan demikian, integrasi antara negara dan masyarakat adat menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan perbatasan yang berkelanjutan, adaptif, dan kontekstual.

Kata kunci: Dinamika sosial; Identitas transnasional; Masyarakat adat; Perbatasan; Tata kelola perbatasan.

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan antara Papua dan Papua Nugini merupakan salah satu wilayah yang memiliki kompleksitas sosial, budaya, dan politik yang tinggi di kawasan Asia-Pasifik (Chandra, 2026). Wilayah ini tidak hanya menjadi batas administratif antara dua negara, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat yang memiliki keterikatan historis, kultural,

dan genealogis yang melampaui batas negara modern. Dalam konteks ini, perbatasan bukan sekadar garis pemisah, melainkan ruang interaksi sosial yang dinamis.

Secara historis, pembentukan batas negara di kawasan Papua tidak sepenuhnya mempertimbangkan distribusi komunitas adat yang telah hidup secara turun-temurun (Miagoni & Mayor, 2025; Prasetyo, 2024). Pembagian wilayah yang terjadi sejak masa kolonial telah memisahkan kelompok-kelompok masyarakat adat yang sebelumnya berada dalam satu kesatuan sosial dan budaya. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena identitas lintas batas yang tetap bertahan hingga saat ini.

Data dari berbagai studi menunjukkan bahwa terdapat ratusan kelompok etnolinguistik di wilayah Papua dan Papua Nugini, dengan lebih dari 800 bahasa lokal yang digunakan di kawasan ini. Keberagaman tersebut menjadi indikator kuat bahwa identitas masyarakat adat di wilayah ini sangat kompleks dan tidak dapat direduksi hanya pada identitas nasional. Ikatan kekerabatan, bahasa, dan praktik budaya menjadi faktor utama dalam mempertahankan identitas kolektif mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat di perbatasan masih melakukan berbagai aktivitas lintas batas, seperti kunjungan keluarga, perdagangan tradisional, serta pelaksanaan ritual adat bersama. Aktivitas ini menunjukkan bahwa batas negara tidak sepenuhnya membatasi mobilitas sosial mereka (Lutfillah et al., 2022; Purnama, 2023; Sabiq & Khasanah, 2025). Bahkan, dalam banyak kasus, batas tersebut justru dinegosiasikan secara sosial oleh masyarakat adat.

Fenomena ini memunculkan konsep identitas transnasional, yaitu identitas yang terbentuk melalui interaksi lintas negara tanpa kehilangan akar budaya lokal. Identitas ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya dinamika sosial yang tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruksi negara-bangsa modern. Dalam konteks ini, masyarakat adat tidak hanya menjadi subjek kebijakan, tetapi juga aktor aktif dalam membentuk ruang sosial mereka.

Namun demikian, keberadaan identitas transnasional seringkali berhadapan dengan kebijakan negara yang bersifat administratif dan teritorial. Negara cenderung melihat perbatasan sebagai wilayah yang harus dijaga secara ketat demi keamanan dan kedaulatan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara praktik sosial masyarakat adat dengan regulasi formal negara. Sebagai contoh, kebijakan pengawasan perbatasan yang ketat dapat membatasi mobilitas masyarakat adat yang secara tradisional telah terbiasa bergerak bebas di wilayah tersebut. Pembatasan ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga pada aspek ekonomi dan budaya. Masyarakat adat harus beradaptasi dengan berbagai aturan baru yang terkadang tidak sesuai dengan praktik lokal mereka.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui berbagai program pembangunan perbatasan telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan penguatan keamanan. Namun, pendekatan pembangunan yang bersifat top-down seringkali kurang memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat adat.

Hal serupa juga terjadi di wilayah Papua Nugini, di mana tantangan dalam pengelolaan perbatasan mencakup keterbatasan kapasitas institusional dan infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan perbatasan menjadi tidak optimal dan membuka ruang bagi praktik-praktik informal yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

Dalam perspektif akademik, kajian mengenai perbatasan telah berkembang pesat melalui pendekatan *border studies* yang menekankan pentingnya melihat perbatasan sebagai ruang sosial. Namun, masih terdapat kekurangan dalam integrasi antara pendekatan ini dengan studi mengenai masyarakat adat dan identitas transnasional, khususnya di kawasan Papua.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek keamanan atau ekonomi perbatasan, sementara dimensi sosial dan identitas seringkali kurang mendapat perhatian yang memadai. Padahal, pemahaman terhadap dinamika sosial masyarakat adat sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam dinamika sosial dan identitas transnasional masyarakat adat di kawasan perbatasan Papua–Papua Nugini. Pendekatan yang digunakan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai realitas sosial di lapangan.

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana dinamika sosial masyarakat adat membentuk dan mempertahankan identitas transnasional di tengah batas negara yang bersifat formal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi lintas batas serta implikasinya terhadap tata kelola perbatasan.

Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya untuk memahami struktur sosial dan jaringan kekerabatan yang melintasi batas negara, serta bagaimana praktik budaya dan ekonomi masyarakat adat mencerminkan identitas transnasional tersebut. Hal ini penting untuk melihat bagaimana masyarakat adat memaknai ruang perbatasan dalam kehidupan mereka.

Rumusan pertanyaan penelitian dalam studi ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam, yaitu bagaimana dinamika sosial membentuk identitas transnasional masyarakat adat, bagaimana praktik sosial dan budaya mencerminkan mobilitas lintas batas, serta bagaimana masyarakat beradaptasi dengan kebijakan negara yang ada. Pertanyaan penelitian ini juga mencakup analisis terhadap interaksi antara kebijakan formal negara dengan praktik lokal masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam melihat hubungan antara struktur kekuasaan dan praktik sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mempertanyakan implikasi dari dinamika sosial dan identitas transnasional terhadap model tata kelola perbatasan yang ada saat ini. Apakah model yang diterapkan sudah mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat, atau justru menciptakan ketegangan baru? Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep identitas transnasional dalam konteks masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal. Dalam jangka panjang, pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika sosial masyarakat adat di perbatasan dapat menjadi dasar dalam membangun tata kelola perbatasan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini penting mengingat perbatasan bukan hanya wilayah geopolitik, tetapi juga ruang kehidupan bagi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dinamika sosial, kuatnya ikatan kekerabatan lintas batas, serta ketegangan antara kebijakan negara dan praktik lokal masyarakat adat di kawasan perbatasan Papua–Papua Nugini, penelitian ini menjadi sangat penting dan strategis untuk dilakukan. Studi ini tidak hanya berupaya mengisi kesenjangan literatur terkait identitas

transnasional dalam konteks masyarakat adat, tetapi juga memberikan dasar empiris yang kuat bagi perumusan kebijakan perbatasan yang lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial yang hidup di masyarakat, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak efektif bahkan kontraproduktif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara perspektif akademik dan kebutuhan praktis di lapangan, sekaligus memperkuat posisi masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pembangunan dan tata kelola wilayah perbatasan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika sosial dan konstruksi identitas transnasional masyarakat adat di kawasan perbatasan Papua–Papua Nugini. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial yang kompleks, kontekstual, dan tidak dapat direduksi ke dalam angka-angka statistik semata. Creswell dan Poth dalam *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (2018) menegaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam suatu fenomena sosial tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana masyarakat adat memaknai identitas mereka, serta bagaimana interaksi lintas batas membentuk praktik sosial sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan kualitatif-deskriptif menjadi relevan untuk menggambarkan secara komprehensif fenomena identitas transnasional yang berkembang dalam ruang perbatasan yang dinamis.

Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan fenomena sosial yang terjadi, tetapi juga menganalisis hubungan antar variabel sosial yang membentuk dinamika tersebut. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara mendalam dan mengaitkannya dengan kerangka teoritis yang telah dibangun sebelumnya. Flick dalam *An Introduction to Qualitative Research* (2018) menyatakan bahwa pendekatan ini berupaya memahami proses sosial secara holistik dengan menekankan pada interpretasi terhadap konteks dan makna yang terkandung dalam data. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan konsep-konsep seperti transnasionalisme, identitas budaya, dan border studies, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur terhadap berbagai sumber akademik dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data meliputi jurnal ilmiah bereputasi internasional, buku akademik, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat adat, perbatasan, dan identitas transnasional. Snyder dalam *Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines* (2019) menjelaskan bahwa studi literatur merupakan metode yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian yang telah ada guna membangun kerangka konseptual yang kuat. Oleh karena itu, penggunaan data sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan berbasis bukti mengenai fenomena yang dikaji.

Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi dan analisis literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi topik, kredibilitas sumber, dan tahun publikasi (2015–2025), guna memastikan bahwa data yang digunakan bersifat mutakhir dan valid. Proses seleksi literatur juga mempertimbangkan kualitas metodologis dari setiap sumber agar hasil sintesis yang diperoleh memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik yang dipadukan dengan analisis konten (content analysis). Braun dan Clarke dalam *Thematic Analysis: A Practical Guide* (2021) menjelaskan bahwa analisis tematik merupakan metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahap, yaitu: (1) membaca dan memahami seluruh data secara menyeluruh, (2) melakukan proses coding untuk mengidentifikasi konsep-konsep penting, (3) mengelompokkan kode ke dalam tema-tema utama seperti dinamika sosial, identitas transnasional, dan relasi negara-masyarakat, serta (4) melakukan interpretasi terhadap hubungan antar tema tersebut. Selain itu, analisis konten digunakan untuk memperkuat interpretasi dengan mengkaji makna teks secara lebih mendalam dan sistematis, sebagaimana dijelaskan oleh Krippendorff dalam *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2018). Dengan mengombinasikan kedua teknik ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, mendalam, dan memiliki validitas konseptual yang kuat dalam menjelaskan dinamika sosial dan identitas transnasional masyarakat adat di kawasan perbatasan Papua–Papua Nugini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Sosial dan Jaringan Kekerabatan Lintas Batas

Struktur sosial masyarakat adat di kawasan perbatasan antara Papua dan Papua Nugini menunjukkan karakteristik yang unik karena tidak sepenuhnya mengikuti batas administratif negara modern. Dalam banyak komunitas adat, hubungan kekerabatan berbasis klan, marga, dan garis genealogis tetap menjadi fondasi utama dalam mengatur kehidupan sosial. Studi dari International Organization for Migration (IOM, 2022) menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan Skouw–Wutung masih memiliki hubungan keluarga langsung yang tersebar di kedua sisi perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa batas negara tidak serta-merta memutus jaringan sosial yang telah terbentuk secara historis. Dalam perspektif antropologi, kondisi ini mencerminkan keberlanjutan sistem sosial tradisional yang lebih kuat dibandingkan konstruksi politik negara. Oleh karena itu, struktur sosial masyarakat adat di kawasan ini lebih tepat dipahami sebagai jaringan sosial lintas batas yang bersifat cair, adaptif, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, hubungan kekerabatan lintas batas ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diwujudkan dalam praktik sosial yang konkret. Berdasarkan laporan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP, 2023), masyarakat adat di wilayah perbatasan sering melakukan kunjungan keluarga tanpa prosedur administratif formal, terutama dalam konteks acara adat seperti pernikahan, kematian, dan ritual keagamaan. Praktik ini menunjukkan bahwa norma adat seringkali lebih dominan dibandingkan regulasi negara dalam mengatur interaksi sosial. Selain itu, jaringan kekerabatan juga berfungsi sebagai mekanisme solidaritas sosial yang memungkinkan distribusi sumber daya secara kolektif. Dalam konteks ini, hubungan keluarga

tidak hanya menjadi identitas sosial, tetapi juga menjadi sistem ekonomi informal yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah perbatasan.

Dalam konteks yang lebih luas, keberlanjutan jaringan kekerabatan lintas batas ini juga didukung oleh kesamaan budaya, bahasa, dan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat adat di kedua sisi perbatasan. Penelitian oleh Timmer (2019) menunjukkan bahwa banyak komunitas di Papua dan Papua Nugini memiliki kesamaan bahasa dan sistem kekerabatan yang berasal dari akar sejarah yang sama. Kesamaan ini memperkuat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang melampaui batas negara. Dalam hal ini, perbatasan negara tidak berfungsi sebagai pemisah sosial, melainkan sebagai ruang yang mempertemukan berbagai praktik budaya yang serupa. Oleh karena itu, jaringan kekerabatan lintas batas dapat dipahami sebagai bentuk resistensi sosial terhadap fragmentasi yang dihasilkan oleh sistem negara modern.

Namun demikian, dinamika tersebut tidak sepenuhnya bebas dari tekanan eksternal, terutama dari kebijakan negara yang berupaya mengontrol mobilitas lintas batas. Laporan dari media nasional seperti Kompas (2023) menunjukkan bahwa penguatan pengawasan di perbatasan seringkali membatasi interaksi sosial masyarakat adat, terutama dalam konteks keamanan dan imigrasi. Meskipun demikian, masyarakat tetap menemukan cara untuk mempertahankan hubungan sosial mereka, baik melalui jalur informal maupun negosiasi dengan aparat setempat. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara sistem sosial adat dan sistem administratif negara. Dalam kondisi ini, jaringan kekerabatan berfungsi sebagai mekanisme adaptasi yang memungkinkan masyarakat tetap mempertahankan identitas dan hubungan sosial mereka.

Selain itu, perkembangan infrastruktur perbatasan juga memberikan dampak terhadap struktur sosial masyarakat adat. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw, misalnya, telah meningkatkan interaksi ekonomi dan mobilitas masyarakat, tetapi juga membawa perubahan dalam pola hubungan sosial. Data dari Kementerian PUPR (2022) menunjukkan bahwa peningkatan aksesibilitas mendorong munculnya interaksi baru yang lebih formal dan terintegrasi dengan sistem negara. Namun, di sisi lain, hal ini juga berpotensi menggeser peran jaringan kekerabatan tradisional sebagai mekanisme utama dalam mengatur kehidupan sosial. Oleh karena itu, perubahan ini perlu dipahami sebagai bagian dari transformasi sosial yang sedang berlangsung di kawasan perbatasan.

Dengan demikian, struktur sosial dan jaringan kekerabatan lintas batas di kawasan Papua–Papua Nugini menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem sosial yang kompleks, adaptif, dan tidak sepenuhnya tunduk pada batas negara. Jaringan ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi, budaya, dan politik yang memungkinkan masyarakat bertahan dalam situasi yang penuh tantangan. Temuan ini menegaskan bahwa dalam memahami dinamika sosial di wilayah perbatasan, pendekatan yang berfokus pada negara saja tidak cukup. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual yang mampu menangkap peran masyarakat adat sebagai aktor utama dalam membentuk ruang sosial lintas batas.

Praktik Sosial dan Mobilitas Transnasional

Praktik sosial masyarakat adat di kawasan perbatasan Papua–Papua Nugini memperlihatkan pola interaksi lintas batas yang intens dan berkelanjutan. Mobilitas masyarakat tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya yang telah mengakar kuat. Berdasarkan laporan International Organization for

Migration (2022), masyarakat di wilayah Skouw–Wutung secara rutin melakukan pergerakan lintas batas untuk mengunjungi keluarga, menghadiri upacara adat, serta melakukan aktivitas perdagangan tradisional. Mobilitas ini menunjukkan bahwa batas negara tidak menjadi penghalang utama dalam kehidupan sosial masyarakat adat. Sebaliknya, batas tersebut justru menjadi bagian dari ruang interaksi yang memungkinkan terbentuknya jaringan sosial yang lebih luas. Dalam perspektif transnasionalisme, praktik ini mencerminkan keberadaan “everyday transnationalism”, yaitu aktivitas lintas batas yang berlangsung secara rutin dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, aktivitas perdagangan tradisional menjadi salah satu bentuk mobilitas yang paling menonjol di kawasan ini. Berdasarkan laporan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (2023), masyarakat adat sering melakukan barter atau jual beli komoditas lokal seperti hasil hutan, ikan, dan kerajinan tangan di pasar perbatasan. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana interaksi sosial yang memperkuat hubungan antar komunitas. Dalam banyak kasus, transaksi ekonomi dilakukan tanpa menggunakan sistem formal negara, melainkan berdasarkan kepercayaan dan norma adat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi lokal masih memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat perbatasan.

Selain perdagangan, ritual adat juga menjadi faktor penting yang mendorong mobilitas lintas batas. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal antropologi regional (Timmer, 2019) menunjukkan bahwa masyarakat adat di Papua dan Papua Nugini sering mengadakan ritual bersama yang melibatkan komunitas dari kedua sisi perbatasan. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat solidaritas sosial dan identitas kolektif. Dengan demikian, mobilitas lintas batas dalam konteks ritual adat menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat adat.

Namun demikian, mobilitas ini seringkali menghadapi tantangan dari regulasi negara yang semakin ketat. Laporan dari media nasional seperti Kompas (2023) menunjukkan bahwa peningkatan pengawasan di perbatasan dapat membatasi pergerakan masyarakat adat, terutama dalam konteks keamanan dan imigrasi. Meskipun demikian, masyarakat tetap berupaya mempertahankan mobilitas mereka melalui berbagai strategi adaptasi, seperti menggunakan jalur informal atau bernegosiasi dengan aparat setempat. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara praktik sosial masyarakat adat dan kebijakan negara.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur perbatasan juga memberikan dampak signifikan terhadap pola mobilitas masyarakat. Data dari Kementerian PUPR (2022) menunjukkan bahwa pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah meningkatkan aksesibilitas dan memfasilitasi mobilitas yang lebih terstruktur. Namun, perubahan ini juga membawa konsekuensi terhadap praktik sosial tradisional, yang harus beradaptasi dengan sistem formal negara. Dengan demikian, mobilitas transnasional masyarakat adat mengalami transformasi yang dipengaruhi oleh dinamika pembangunan.

Secara keseluruhan, praktik sosial dan mobilitas transnasional masyarakat adat di perbatasan Papua–Papua Nugini menunjukkan bahwa batas negara tidak sepenuhnya membatasi interaksi sosial. Sebaliknya, masyarakat adat mampu mengintegrasikan batas tersebut ke dalam kehidupan mereka. Mobilitas lintas batas menjadi bagian dari strategi sosial yang memungkinkan mereka mempertahankan hubungan kekerabatan, budaya, dan ekonomi.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap mobilitas transnasional menjadi kunci dalam memahami dinamika sosial masyarakat adat di kawasan perbatasan.

Konstruksi Identitas Transnasional Masyarakat Adat

Konstruksi identitas transnasional masyarakat adat di kawasan perbatasan Papua–Papua Nugini merupakan proses sosial yang kompleks dan dinamis. Identitas tersebut tidak hanya dibentuk oleh faktor geografis, tetapi juga oleh sejarah, budaya, dan relasi sosial yang melintasi batas negara. Penelitian oleh Putra et al. (2024) dalam jurnal *International Journal of Intercultural Relations* menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki identitas yang bersifat multilapis, yang mencakup dimensi lokal, nasional, dan transnasional. Dalam konteks perbatasan, identitas ini semakin kompleks karena adanya interaksi intens dengan komunitas di negara tetangga.

Lebih lanjut, identitas transnasional masyarakat adat dibentuk melalui praktik sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas seperti kunjungan keluarga, perdagangan, dan ritual adat menjadi sarana utama dalam mempertahankan identitas tersebut. Dalam perspektif teori identitas, hal ini menunjukkan bahwa identitas tidak bersifat statis, tetapi terus dibentuk melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, identitas transnasional masyarakat adat dapat dipahami sebagai hasil dari proses negosiasi antara berbagai faktor yang saling terkait.

Dalam konteks budaya, simbol-simbol lokal memainkan peran penting dalam konstruksi identitas. Penelitian oleh Kanem et al. (2018) menunjukkan bahwa simbol seperti noken menjadi representasi identitas masyarakat Papua yang kuat. Simbol ini tidak hanya memiliki makna budaya, tetapi juga menjadi alat untuk mempertahankan identitas dalam konteks global. Dengan demikian, identitas transnasional tidak berarti kehilangan identitas lokal, tetapi justru memperkuatnya.

Namun demikian, konstruksi identitas ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan negara dan globalisasi. Laporan dari IWGIA (2025) menunjukkan bahwa masyarakat adat masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas mereka di tengah tekanan politik dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa identitas transnasional tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga politis.

Di sisi lain, pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas masyarakat adat. Dewantara et al. (2025) menunjukkan bahwa pengalaman pendidikan di wilayah perbatasan dapat membentuk identitas yang fleksibel dan adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa identitas terus berkembang melalui interaksi sosial dan pengalaman hidup.

Secara keseluruhan, konstruksi identitas transnasional masyarakat adat di perbatasan Papua–Papua Nugini merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Identitas tersebut dibentuk melalui interaksi antara faktor lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, pemahaman terhadap identitas ini memerlukan pendekatan yang integratif dan kontekstual.

Interaksi antara Kebijakan Negara dan Praktik Lokal

Interaksi antara kebijakan negara dan praktik lokal masyarakat adat di kawasan perbatasan Papua menunjukkan dinamika yang kompleks dan seringkali penuh ketegangan. Negara cenderung memandang perbatasan sebagai wilayah strategis yang harus dikontrol, sementara masyarakat adat melihatnya sebagai ruang sosial yang terbuka. Studi oleh Harefa & Supriyadi (2025) menunjukkan bahwa pendekatan keamanan masih menjadi prioritas utama dalam pengelolaan perbatasan Papua.

Namun demikian, pendekatan ini seringkali tidak sejalan dengan praktik sosial masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki sistem sosial dan budaya yang telah mengatur kehidupan mereka jauh sebelum negara hadir, sehingga batas administratif negara tidak sepenuhnya menjadi acuan utama dalam interaksi sosial mereka. Kondisi ini dapat dilihat secara nyata pada masyarakat di wilayah Skouw, Kota Jayapura, yang berbatasan langsung dengan Vaimo di Papua Nugini, serta masyarakat di Kabupaten Keerom yang memiliki hubungan kekerabatan erat dengan komunitas di wilayah perbatasan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak warga di kedua wilayah ini merupakan bagian dari satu garis keluarga atau marga yang sama, sehingga aktivitas sosial seperti kunjungan keluarga, menghadiri acara adat, hingga kerja sama ekonomi dilakukan secara lintas batas tanpa memandang garis negara sebagai pemisah utama. Bahkan, dalam banyak kasus, wilayah tanah ulayat masyarakat adat juga melintasi batas negara, karena pembagian wilayah tersebut telah ada jauh sebelum penetapan batas politik modern antara Indonesia dan Papua Nugini. Hal ini menyebabkan masyarakat tetap mengakses, mengelola, dan memanfaatkan wilayah adat mereka di kedua sisi perbatasan berdasarkan norma dan hukum adat yang berlaku. Dalam konteks ini, kebijakan negara yang bersifat top-down dan menekankan kontrol administratif seringkali tidak efektif, karena tidak sepenuhnya mempertimbangkan realitas sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara kebijakan formal negara dan praktik lokal masyarakat adat menjadi tantangan utama dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Dalam banyak kasus, masyarakat adat melakukan adaptasi terhadap kebijakan negara. Mereka tidak sepenuhnya menolak kebijakan tersebut, tetapi menyesuaikan dengan praktik lokal yang telah lama mereka jalankan. Hal ini menunjukkan adanya proses negosiasi yang dinamis antara negara dan masyarakat adat dalam mengelola kehidupan di wilayah perbatasan. Salah satu bentuk konkret dari proses adaptasi ini dapat dilihat melalui penerapan Kartu Lintas Batas (KLB) yang digunakan oleh masyarakat perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Berdasarkan pengaturan khusus (*special arrangement*) antara kedua negara, masyarakat adat yang tinggal di wilayah perbatasan diberikan kemudahan untuk melintasi batas negara melalui mekanisme tradisional dengan menggunakan KLB, di mana warga Indonesia menggunakan kartu berwarna merah, sedangkan warga Papua Nugini menggunakan kartu berwarna kuning. Kartu ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas lintas batas dalam radius tertentu tanpa harus melalui prosedur imigrasi yang kompleks, selama aktivitas tersebut bersifat tradisional, seperti kunjungan keluarga, kegiatan adat, dan perdagangan skala kecil. Keberadaan KLB ini menunjukkan bahwa negara pada dasarnya mengakui realitas sosial masyarakat adat yang telah lama hidup dalam sistem lintas batas. Namun demikian, implementasinya di lapangan tetap memerlukan penyesuaian dengan praktik lokal, karena masyarakat tidak selalu membedakan secara tegas antara aktivitas formal dan informal. Oleh karena itu, penggunaan KLB dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara kepentingan negara dalam menjaga kedaulatan wilayah dan kebutuhan masyarakat adat untuk mempertahankan hubungan sosial, budaya, dan ekonomi lintas batas yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Selain itu, pembangunan infrastruktur perbatasan juga memengaruhi pola interaksi antara kebijakan negara dan praktik sosial masyarakat adat di wilayah perbatasan. Hal ini terlihat jelas pada keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Kabupaten Merauke dan PLBN Skouw di Kota Jayapura, yang dibangun untuk memperkuat konektivitas, pelayanan lintas

batas, dan pengawasan negara. Namun, riset terbaru Melyana Ratana Pugu dalam artikel *A Case Study of the Sota, Merauke Cross-Border Post and Socio-Economic Changes in the Indonesia–Papua New Guinea Border Region* (2025) menunjukkan bahwa kehadiran PLBN Sota tidak serta-merta mengubah logika sosial masyarakat perbatasan secara total. Pugu menjelaskan bahwa setelah PLBN dibangun pada 2019 dan diresmikan pada Oktober 2021, memang terjadi perubahan sosial-ekonomi berupa meningkatnya akses, peluang usaha, dan penguatan simbol kehadiran negara, tetapi pada saat yang sama masyarakat Sota dan Weam tetap mempertahankan pola mobilitas tradisional untuk kunjungan keluarga, perdagangan kecil, dan relasi sosial adat. Temuan ini menunjukkan bahwa infrastruktur formal negara menciptakan ruang interaksi yang lebih teratur, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan pola hubungan sosial lama yang berbasis adat dan kekerabatan. Dalam konteks Skouw, fenomena serupa juga tampak ketika masyarakat tetap menjalin hubungan sosial dan ekonomi dengan Vanimo melalui pasar perbatasan dan kunjungan kekeluargaan, meskipun pengawasan administratif semakin kuat. Karena itu, pembangunan PLBN sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai instrumen kontrol teritorial, tetapi juga sebagai ruang negosiasi baru antara sistem formal negara dan praktik sosial masyarakat adat yang telah berlangsung lintas generasi.

Di sisi lain, kebijakan negara memang membuka peluang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kawasan perbatasan, tetapi tingkat kontribusinya tidak dapat digeneralisasi sebagai sepenuhnya kuat atau sepenuhnya lemah. Dokumen perencanaan BNPP dan regulasi pengelolaan kawasan perbatasan menempatkan pemberdayaan masyarakat desa terdepan, sinergi dengan tokoh masyarakat, serta pelibatan komunitas lokal sebagai bagian dari agenda nasional pengelolaan perbatasan. Dalam lampiran program BNPP juga terlihat adanya intervensi nyata di wilayah perbatasan Papua, misalnya di Kabupaten Keerom tercantum program Pemberdayaan Kelompok Adat Terpencil (KAT) dari Kementerian Sosial, selain program perlindungan sosial dan dukungan pertanian. Ini menunjukkan bahwa secara kebijakan, negara tidak hanya hadir melalui pendekatan keamanan dan infrastruktur, tetapi juga melalui skema pemberdayaan sosial-ekonomi yang ditujukan kepada masyarakat lokal.

Namun, jika ditanya apakah masyarakat adat perbatasan Papua benar-benar berkontribusi dalam pembangunan, jawabannya adalah: ya, tetapi kontribusi tersebut masih sering berlangsung dalam ruang yang terbatas dan belum selalu menentukan arah kebijakan. Di satu sisi, masyarakat lokal berkontribusi melalui perdagangan lintas batas, aktivitas pasar perbatasan, jasa informal, pertanian, serta keterlibatan mereka dalam menjaga stabilitas sosial di kampung-kampung perbatasan. Contoh di Skouw menunjukkan bahwa kawasan perbatasan berkembang menjadi pusat aktivitas sosial-ekonomi; BNPP bahkan mencatat nilai ekspor melalui PLBN Skouw pada 2024 mencapai Rp50,45 miliar, naik 59 persen dibanding 2023, yang menandakan adanya peran pelaku usaha dan komunitas lokal dalam menghidupkan ekonomi kawasan. Di sisi lain, banyak kebijakan tetap dirancang dari atas, sehingga masyarakat adat lebih sering menjadi peserta pelaksanaan daripada penentu desain pembangunan. Karena itu, kontribusi mereka nyata pada level praktik dan keberlangsungan ekonomi-sosial, tetapi secara kelembagaan posisi mereka masih cenderung belum sepenuhnya setara dalam menentukan arah tata kelola perbatasan.

Dengan demikian, penilaian yang paling tepat adalah bahwa masyarakat adat perbatasan Papua memang berkontribusi, tetapi kontribusi tersebut belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam model pembangunan yang benar-benar berbasis masyarakat adat. Mereka aktif sebagai

penggerak ekonomi lokal, penjaga relasi sosial lintas batas, dan aktor yang menopang ketahanan keseharian kawasan perbatasan. Akan tetapi, ruang partisipasi yang tersedia masih sering bersifat konsultatif atau implementatif, belum sepenuhnya deliberatif dan menentukan. Artinya, negara telah membuka pintu partisipasi, tetapi belum selalu menggeser masyarakat adat ke posisi sentral sebagai co-designer pembangunan perbatasan. Oleh sebab itu, untuk menjadikan partisipasi itu substantif, kebijakan pembangunan perbatasan di Papua perlu bergerak dari sekadar pemberdayaan administratif menuju pengakuan yang lebih kuat atas kapasitas masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan.

Implikasi terhadap Tata Kelola Perbatasan

Implikasi utama dari temuan penelitian ini adalah perlunya reposisi masyarakat adat sebagai aktor kunci dalam tata kelola perbatasan antara Papua dan Papua Nugini. Selama ini, mekanisme formal seperti Border Liaison Officers Meeting (BLOM), Border Liaison Meeting (BLM), maupun Joint Border Committee (JBC) cenderung didominasi oleh aktor negara, sementara masyarakat adat sebagai pemilik ulayat di kedua sisi perbatasan belum sepenuhnya dilibatkan secara struktural. Padahal, masyarakat adat memiliki pengetahuan spasial, sosial, dan ekologis yang sangat mendalam terhadap wilayah perbatasan, karena mereka mengenal batas-batas ulayat, jaringan klen atau marga, serta sejarah interaksi sosial lintas batas secara turun-temurun. Oleh karena itu, integrasi tokoh adat ke dalam komite adat lintas negara dalam forum-forum tersebut menjadi sangat penting untuk menciptakan tata kelola perbatasan yang lebih inklusif dan kontekstual.

Lebih jauh, masyarakat adat perbatasan juga memiliki kapasitas unik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Nilai-nilai adat seperti totemisme—misalnya simbol penyu, ikan, burung cenderawasih, atau kasuari—tidak hanya menjadi identitas kultural, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme konservasi tradisional yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Filosofi ini mencerminkan cara pandang ekologis yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, bukan sebagai penguasa yang mengeksploitasi. Dalam konteks kawasan perbatasan yang mencakup wilayah darat hingga pesisir Samudra Pasifik, peran masyarakat adat menjadi sangat strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem lintas batas. Dengan demikian, pelibatan mereka dalam tata kelola perbatasan tidak hanya memperkuat legitimasi sosial kebijakan negara, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, model tata kelola perbatasan ke depan perlu mengadopsi pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan negara dan masyarakat adat sebagai mitra sejajar. Pembentukan komite adat lintas negara yang terhubung dengan mekanisme resmi seperti BOM, BLM, dan JBC dapat menjadi langkah strategis untuk menjembatani kepentingan negara dan realitas sosial di lapangan. Dengan melibatkan tokoh adat dari kedua negara, proses pengambilan keputusan akan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, sekaligus memperkuat stabilitas sosial dan hubungan bilateral. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga empiris, karena berangkat dari praktik sosial yang telah berlangsung lama di masyarakat perbatasan Papua–Papua Nugini.

Sebagai penguatan dari pendekatan tersebut, perlu dilakukan langkah institusional dengan memasukkan perwakilan masyarakat adat sebagai komite resmi dalam struktur lembaga pengelolaan perbatasan kedua negara. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat simbolik

atau konsultatif, tetapi harus ditempatkan secara formal dalam mekanisme pengambilan keputusan yang terhubung dengan forum seperti Border Officers Meeting (BOM), Border Liaison Meeting (BLM), dan Joint Border Committee (JBC). Dengan demikian, tokoh-tokoh adat yang merupakan pemilik ulayat di wilayah perbatasan Papua–Papua Nugini dapat berperan langsung dalam memberikan pertimbangan berbasis pengetahuan lokal terkait batas wilayah, jaringan kekerabatan, serta dinamika sosial yang tidak selalu tercatat dalam sistem administrasi negara. Integrasi ini juga memungkinkan terbangunnya sistem tata kelola yang lebih responsif terhadap potensi konflik, karena masyarakat adat memiliki kapasitas untuk mendeteksi dan menyelesaikan persoalan secara dini melalui mekanisme adat. Selain itu, pengakuan formal terhadap peran masyarakat adat dalam lembaga perbatasan akan memperkuat legitimasi kebijakan negara di mata masyarakat lokal, sehingga implementasi program pembangunan dan pengamanan wilayah menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, pembentukan komite adat lintas negara yang dilembagakan secara resmi menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola perbatasan yang kolaboratif, berkelanjutan, dan berakar pada realitas sosial masyarakat perbatasan itu sendiri.

Dengan demikian, keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa dinamika sosial, praktik lintas batas, serta konstruksi identitas transnasional masyarakat adat di kawasan perbatasan Papua–Papua Nugini tidak dapat dipisahkan dari relasi historis, budaya, dan politik yang saling berkelindan. Masyarakat adat terbukti tidak hanya menjadi pelaku pasif, tetapi aktor strategis yang mampu menjaga konektivitas sosial, stabilitas lokal, serta keberlanjutan sumber daya alam melalui kearifan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perbatasan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat adat secara formal bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan yang mendesak untuk menjawab kompleksitas wilayah perbatasan. Berangkat dari temuan tersebut, bagian selanjutnya akan merumuskan kesimpulan yang menegaskan kontribusi penelitian ini, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan model tata kelola perbatasan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dinamika sosial masyarakat adat di kawasan perbatasan Papua–Papua Nugini membentuk identitas transnasional yang kuat, hidup, dan terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Identitas tersebut tidak lahir semata-mata karena kedekatan geografis, tetapi terutama karena keberlanjutan hubungan kekerabatan, kesamaan budaya, penguasaan wilayah ulayat, serta praktik sosial lintas batas yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dengan demikian, batas negara modern tidak sepenuhnya memutus relasi sosial masyarakat adat, melainkan hanya menambahkan dimensi administratif pada ruang hidup yang secara sosial dan kultural tetap terhubung.

Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik sosial masyarakat adat, seperti kunjungan keluarga, perdagangan tradisional, ritual adat, serta pemanfaatan wilayah ulayat, merupakan bentuk nyata dari keberlangsungan identitas transnasional tersebut. Dalam konteks ini, masyarakat adat tidak hanya bertahan sebagai kelompok budaya, tetapi juga tampil sebagai aktor sosial yang aktif menegosiasikan hubungan antara adat, negara, dan ruang

perbatasan. Oleh sebab itu, identitas transnasional masyarakat adat di kawasan ini harus dipahami sebagai proses sosial yang dinamis, bukan sebagai identitas yang statis atau tunggal.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat ketegangan antara pendekatan negara yang cenderung berorientasi pada keamanan dan kontrol administratif dengan praktik lokal masyarakat adat yang lebih fleksibel, relasional, dan berbasis kearifan adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola perbatasan yang terlalu berpusat pada negara belum sepenuhnya mampu menjawab realitas sosial masyarakat di lapangan. Karena itu, dibutuhkan pendekatan tata kelola yang lebih inklusif, yang tidak hanya menempatkan masyarakat adat sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek dan mitra strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa identitas transnasional masyarakat adat di perbatasan Papua–Papua Nugini tidak hanya dapat dijelaskan melalui konsep lintas negara dalam arti administratif, tetapi juga harus dipahami melalui keterhubungan antara sistem kekerabatan, wilayah ulayat, simbol budaya, dan kosmologi adat yang melampaui batas politik modern. Selain itu, penelitian ini menawarkan gagasan bahwa masyarakat adat pemilik ulayat di kedua negara perlu diintegrasikan secara formal ke dalam tata kelola perbatasan melalui komite adat lintas negara yang terhubung dengan mekanisme resmi seperti Border Officers Meeting, Border Liaison Meeting, dan Joint Border Committee.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan perbatasan Papua–Papua Nugini akan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan apabila dibangun melalui kolaborasi antara negara dan masyarakat adat. Pelibatan tokoh-tokoh adat perbatasan secara resmi bukan hanya penting untuk memperkuat legitimasi sosial kebijakan negara, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas kawasan, melindungi sumber daya alam, serta merawat hubungan sosial lintas batas yang telah diwariskan secara turun-temurun. Atas dasar itu, tata kelola perbatasan ke depan perlu diarahkan pada model yang adaptif, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal masyarakat adat.

REFERENSI

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2024, March 21). *PLBN Skouw bahas penanganan isu prioritas perlintasan antarnegara RI–PNG*. <https://bnpp.go.id/berita/plbn-skouw-bahas-penanganan-isu-prioritas-perlintasan-antarnegara-ri-png>
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2025, October 25). *PLBN Skouw jadi motor penggerak ekonomi dan pusat aktivitas sosial di perbatasan timur Indonesia*. <https://bnpp.go.id/berita/plbn-skouw-jadi-motor-penggerak-ekonomi-dan-pusat-aktivitas-sosial-di-perbatasan-timur-indonesia>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Chandra, M. N. N. (2026). *Strategi pengelolaan keamanan perbatasan Indonesia dalam menghadapi penyelundupan senjata di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini = Indonesia's border security management strategy in response to weapons smuggling in the Indonesia–Papua New Guinea border*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewantara, J. A., Budimansyah, D., Komalasari, K., Hidayat, D. N., Efriani, E., & Nurgiansah, T. H. (2025). Multisite ethnography of transnational experiences of border school students: Culture, identity, and citizenship. *Issues in Educational Research*, 35(4).
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.

- Harefa, F., & Supriyadi, A. A. (2025). Leadership strategies for enhancing border security in Papua: A collaborative approach to surveillance and threat management. *Journal of National Paradigm-Based Resilience Strategy*, 2(1), 1–16.
- Kanem, V., & Norris, A. (2018). An examination of the noken and Indigenous cultural identity: Voices of Papuan women. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 3(1), 01.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Li, X., Meng, X., Ruiz, R. A., & Liew, J. (2025). Types of relations between national identity and global identity and their associated factors: A scoping review. *International Journal of Intercultural Relations*, 105.
- Lutfillah, M. M., Marini, A., & Nafiah, M. (2022). Pengelolaan pendidikan dasar dikaitkan dengan mobilitas sosial. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam*, 9(1), 126–143.
- Miagoni, Y., & Mayor, D. E. (2025). *Resolusi konflik perang suku Mee dan suku Moni di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Prasetio, D. E. (2024). Perlindungan dan pengakuan hak ulayat masyarakat adat Biak Papua. *Realism: Law Review*, 2(1), 54–82.
- Pugu, M. R. (2025). A case study of the Sota, Merauke cross-border post and socio-economic changes in the Indonesia–Papua New Guinea border region. *International Journal of Science and Research*, 14(3).
- Purnama, G. A. F. (2023). *Pembatasan mobilitas sosial warga penolak kewajiban vaksinasi dalam perspektif hukum HAM internasional*. Universitas Islam Indonesia.
- Putra, I. E., Putera, V. S., Rumkabu, E., Jayanti, R., Fathoni, A. R., & Caroline, D. J. (2024). “I am Indonesian, am I?”: Papuans’ psychological and identity dynamics about Indonesia. *International Journal of Intercultural Relations*, 99, 101935.
- Sabiq, M. Z., & Khasanah, N. (2025). Mobilitas sosial di era teknologi digital AI: Peluang dan tantangannya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2).
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.